

### **BAB III**

## **HEGEMONI NEGARA, KORPORASI, DAN REJIM EKONOMI GLOBAL DALAM PENCIPTAAN “KULTUR MINYAK” DI AMERIKA SERIKAT**

Sebagai pipa minyak yang dibangun melewati titik-titik rawan seperti sumber air dan tanah sengketa masyarakat adat, pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) mendapatkan pertentangan keras baik dari aktivis lingkungan maupun masyarakat adat. Perlawanan dari aktivis lingkungan dan suku adat, bahkan, berhasil menghentikan pembangunan pipa pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama, pada quarter akhir tahun 2016, yang meminta “pengkajian lingkungan lebih lanjut dan pencarian rute baru” sebagai bentuk penghormatan terhadap suku adat yang sekaligus menjadikan kawasan danau Oahe, yang masuk ke dalam rute konstruksi pipa, sebagai sumber air minum. Meski demikian, pembangunan pipa minyak kembali berjalan pada awal tahun 2017 setelah Presiden Trump menggunakan *President Executive Order* untuk dapat mempercepat pembangunan. Konstruksi DAPL akhirnya selesai pada pertengahan April 2017 dan secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juni 2017, menghubungkan sumur minyak di Dakota Utara dengan Illinois.

Ross Barret dan Daniel Worden dalam *Journal of American Studies* mengungkapkan bahwa minyak telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Amerika Serikat. Ketergantungan Amerika terhadap komoditas tersebut menciptakan apa yang disebut dengan “*oil culture*”, atau “kultur minyak” (Barret & Worden, 2012). Meski demikian, “kultur minyak” di Amerika Serikat tidak tercipta dengan sendirinya. Terdapat penyebaran upaya-upaya untuk membentuk kepercayaan yang kemudian menghegemoni masyarakat bahwa minyak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Amerika Serikat. Proyek-proyek seperti DAPL serta Keystone XL (KXL) yang mengalirkan jutaan

barel minyak dari dan ke Amerika setiap harinya melibatkan semua proses hegemoni termasuk peran agen-agen masyarakat politik dan masyarakat sipil dalam penyebaran *worldview of the ruling class*. Proses tersebut juga tidak terjadi dalam kurun waktu yang singkat, melainkan tahunan hingga *worldview* dari pemerintah terinternalisasi ke dalam masyarakat. Di Amerika, penciptaan kultur minyak telah berlangsung sejak akhir abad ke-19, bertepatan dengan Revolusi Industri dan berkembangnya industri minyak di Amerika Serikat.

### **A. Minyak dan transformasi masyarakat Amerika Serikat**

Kemunculan industri minyak domestik di Amerika Serikat disebut *American Oil & Gas Historical Society* (AOGHS) sebagai “(part that) forever changed America’s economy, standard of living, and culture”. Industri minyak selamanya mengubah ekonomi, standar kehidupan, serta kultur Amerika (*American Oil & Gas Historical Society*, 2008). Minyak mulai mengambil peran penting dalam sejarah Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19, setelah ditemukannya sumur minyak pertama Amerika di kawasan Titusville, Pennsylvania, yang kemudian disusul dengan kemunculan sumur-sumur minyak lain di kawasan tersebut. Keunggulan minyak, termasuk dalam hal kualitas dan efisiensi, secara cepat menggantikan posisi batu bara yang sebelumnya digunakan secara luas sebagai bahan bakar dari mesin uap dan kereta. Dampaknya, peningkatan permintaan pada minyak yang terjadi secara drastis dan melambungkan harga komoditas tersebut. Hal ini juga mendorong pertumbuhan ribuan perusahaan minyak di Amerika Serikat. Di sisi lain, pencarian sumur minyak terus dilakukan yang kemudian menghasilkan penemuan sumur-sumur minyak baru di beberapa negara bagian lain termasuk California, Florida, Kansas, Arizona, Louisiana, Alabama, dan Texas (*American Oil & Gas Historical Society*, 2008). Kesuksesan besar

ditemui di Texas dengan ditemukannya ladang minyak di kawasan Spindletop pada tahun 1901 yang menguntungkan Amerika Serikat dengan tingginya produksi minyak. Spindletop menghasilkan 100.000 barel minyak per hari yang berdampak positif pada ekonomi dan industri Amerika. Penemuan Spindletop, ungkap *American Foreign Relations*, menandai era baru industri minyak Amerika Serikat (American Foreign Relations, 2019).

Kelahiran industri minyak di Amerika Serikat turut mendorong revolusi industri kedua mencapai puncaknya, yakni dari tahun 1870 hingga 1914 dengan barang-barang yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar atau komponen utamanya. Dampaknya, industri Amerika Serikat berkembang pesat dengan total produksi melebihi Inggris sebagai negara industri terbesar di dunia pada dekade akhir abad ke-18. Sedang pada tahun 1920 total ekonomi Amerika Serikat lebih besar dibandingkan dengan gabungan ekonomi milik Inggris Raya, Jerman, Perancis, Italia, Uni Soviet, serta Jepang (American Foreign Relations, 2019). Kemunculan telegram, telepon, bola lampu, dan mobil model-T sebagai produk dari revolusi industri juga mengubah standar hidup masyarakat Amerika. Industri mobil sendiri menjadi salah satu industri yang mengalami perubahan signifikan. Hingga pertengahan abad ke-19, mobil masih menjadi item yang hanya mampu dibeli oleh golongan aristokrat. Pada akhir abad ke-19, melimpahnya pasokan minyak membuat industri mobil milik Henry Ford memproduksi mobil model-T secara masif dan menjualnya dengan harga murah, yang kemudian menjadi *trend* baru bagi warga Amerika Serikat. Dampak lain adalah kesuksesan penerbangan pesawat pertama oleh Wright Brothers pada tahun 1903 serta pembangunan jalur-jalur baru rel kereta hingga ke wilayah terpencil untuk keperluan penyaluran minyak.

Lahir dan berkembangnya industri minyak sejak akhir abad 19 turut berdampak pada transformasi masyarakat Amerika. Mengutip dari *historyofmassachusetts.org*, terdapat

gelombang urbanisasi besar-besaran sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad 20. Statemen tersebut didukung data yang menunjukkan perubahan signifikan jumlah penduduk kota, dimana pada tahun 1800-an hanya 6% dari penduduk Amerika yang tinggal di perkotaan. Persentase tersebut meningkat sebanyak 40% pada tahun 1900, dan pada tahun 1920 mayoritas masyarakat Amerika memilih untuk tinggal di kota, yang juga menjadi tujuan imigran dari Eropa maupun kawasan lain (Brook, 2018).

David S. Painter dalam *Journal of American History* juga mengungkapkan bahwa minyak dan perkembangan teknologi pada era tersebut berdampak transformasi nyata masyarakat. Ia menuliskan bagaimana perkembangan *oil-powered internal combustion engine* (mesin pembakaran internal berbasis minyak) serta rendahnya harga minyak merevolusi transportasi Amerika; membuat mesin tersebut diaplikasikan pada hampir setiap kendaraan bermotor termasuk truk, mobil, kapal, dan pesawat dan berdampak positif pada ekonomi Amerika Serikat. Awal dari apa yang disebutnya sebagai perubahan lanskap fisik, ekonomi, serta sosial Amerika Serikat (Painter, 2012)

### ***Industri minyak Amerika dalam Perang Dunia I dan II***

Selain memberikan profit bagi industri dan pabrik akan surplus produksi dan tenaga kerja murah, industri minyak di Amerika Serikat juga berdampak pada kemajuan di bidang militer yang pada tahun-tahun selanjutnya menguntungkan posisi Amerika dalam Perang Dunia I dan II. *American Foreign Relations* mengungkapkan bagaimana negara-negara yang memiliki akses terhadap sumber minyak dan menggunakannya sebagai bahan bakar utama lebih unggul dari negara lawan yang memiliki akses terbatas terhadap komoditas tersebut (American Foreign Relations, 2019).

Sejak menjamurnya industri minyak yang menguntungkan ekonomi negara, Amerika Serikat semakin

bergantung pada komoditas tersebut pada aspek yang lebih luas. Dalam bidang militer sendiri minyak bahkan telah digunakan sebagai bahan bakar oleh angkatan laut Amerika Serikat dan Inggris Raya sebelum perang dunia berlangsung. Painter menjelaskan bahwa minyak memungkinkan kapal angkatan laut Amerika untuk melaju lebih cepat dan memudahkan proses pengisian bahan bakar. Hal tersebut, ungkap Painter lebih lanjut, sangat membantu angkatan laut Amerika dalam memantau kawasan Pasifik. Minyak, kemudian, mendominasi bahan bakar yang memotori tank, pesawat, kapal selam, serta menjadi bahan utama peledak TNT dalam Perang Dunia I (Painter, 2012).

Kebutuhan akan minyak kemudian meningkat pesat pasca Perang Dunia I, setelah negara-negara *superpower* menyadari urgensi minyak, terutama bagi aspek militer yang pada kurun waktu tersebut menjadi *bargaining position* utama bagi sebuah negara. Melimpahnya pasokan minyak Amerika, dalam hal ini memberi keuntungan tersendiri karena selain mampu memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, Amerika Serikat juga mensuplai kebutuhan minyak sekutu (Black, 2017). Di sisi lain, untuk menambah akses pada sumber minyak, pada dekade '30-an Amerika telah menjalin kerja sama dengan Arab Saudi melalui perusahaan minyak swasta atas dukungan negara (Council on Foreign Relations, 2019). Kerja sama tersebut, memungkinkan Amerika untuk memiliki akses terhadap minyak Saudi dan melebarkan pengaruh geopolitiknya ke negara-negara Timur Tengah. Kerja sama dengan Timur Tengah juga dijalin oleh sekutu, Inggris dan Perancis, untuk memenuhi kebutuhan minyak negara. Posisi Amerika Serikat juga diuntungkan dengan angkatan laut yang kuat dan memungkinkan pengiriman minyak kepada sekutu di Eropa Barat melalui Atlantik. Perancis, yang juga menjalin kerja sama dengan Timur Tengah, turut mengandalkan angkatan laut Amerika Serikat untuk keamanan pengiriman melalui jalur Mediterania (American Foreign Relations, 2019).

Pada Perang Dunia kedua, konsumsi negara-negara akan minyak mencapai puncaknya, dimana minyak menjadi bahan bakar utama seluruh mesin bermotor, termasuk kapal induk, jet tempur dan pembom jarak jauh, yang kemudian disebut oleh *American Foreign Relations* sebagai “*the lifeblood of modern military machine*”. Di saat yang sama, sumur minyak di Amerika Serikat mengalami penurunan produksi, sedangkan konsumsi minyak Amerika Serikat untuk Perang Dunia II sendiri mencapai dua per tiga produksi minyak domestik. Hal ini kemudian mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dan menjadikan perusahaan minyak swasta Amerika sebagai “kendaraan” bagi kepentingan Amerika akan minyak luar negeri (Painter, 2012). Pada tahun-tahun selanjutnya, negara mendukung bentuk kerja sama yang dijalin oleh industri minyak baik dengan negara penghasil minyak maupun perusahaan minyak luar negeri serta membantu terciptanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Tingginya konsumsi Amerika Serikat terhadap minyak yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi minyak domestik menambah ketergantungan Amerika Serikat terhadap suplai minyak Timur Tengah. Ketergantungan tersebut diperparah dengan kebijakan sosio-ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat pasca perang (*American Foreign Relations*, 2019).

### ***Minyak dan preservasi paham kapitalisme pasca perang***

Kontrol Amerika terhadap sumber-sumber minyak di Timur Tengah pasca perang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi posisi Amerika Serikat dalam kontestasi politik internasional. Kebijakan *Marshall Plan* Amerika Serikat pasca perang berhasil meng-*counter* kekuatan Uni Soviet dan menjadikan Amerika sebagai negara adidaya, apa yang disebut Painter sebagai “*ending destructive political economic, and military competition among the core capitalist state*”. Statemen ini didukung oleh tulisan milik J. Bradford De Long dan Barry Eichengreen dalam *the National Bureau of Economic Research* yang menyebut *Marshall Plan* sebagai

*history's most successful structural adjustment program* (Long & Eichengreen, 1991).

Dalam program *Marshall Plan*, minyak memiliki peran yang krusial. David S. Painter dalam tulisannya yang lain yang berjudul "*The Marshall Plan and oil*" mengungkapkan bahwa minyak menjadi satu-satunya sumber energi yang memungkinkan untuk diperoleh setelah kerusakan parah pada tambang-tambang batu bara, yang sebelumnya menyuplai hampir 90% kebutuhan energi Eropa (Painter, 2009). Minyak menjadi komoditas utama yang dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi dan industri Eropa Barat. Amerika Serikat, seperti yang dituliskan Painter, dalam hal ini memastikan Eropa Barat mendapatkan pasokan energi yang dibutuhkan sebelum bergantung pada Uni Soviet yang juga memiliki cadangan minyak dalam teritorinya. Meski demikian, analisis lain diberikan oleh Nicholas Miller Trebat dalam jurnal *Economia e Sociedade* yang menuliskan bahwa selain memberi bantuan finansial untuk membangun ekonomi Eropa Barat, bantuan Amerika Serikat melalui program *Marshall Plan* juga bertujuan untuk menekan perubahan sosial sebagai dampak dari penyebaran segala bentuk paham anti-kapitalis di dalam negeri. Trebat mengutip pernyataan Sekretaris Negara Dean Acheson: "***We cannot go through another ten years like the ten years at the end of Twenties and the beginning of the Thirties, without having the most far-reaching consequences upon our economic and social system***".

Amerika juga menjaga agar permintaan terhadap ekspor barang-barang dari Amerika Serikat tetap tinggi. Trebat mengutip statemen William Clayton: "***We simply can't afford after this war to let our trade drop off...if we want to have relatively high employment...in other words, we have got to export three times as much as we exported just before the war if we want to keep our industry running at somewhere near capacity***" Dengan demikian selain menaikkan pengaruhnya pada sekutu, Eropa Barat akan terintegrasi dalam *American-led world economic order* (Trebat, 2018).

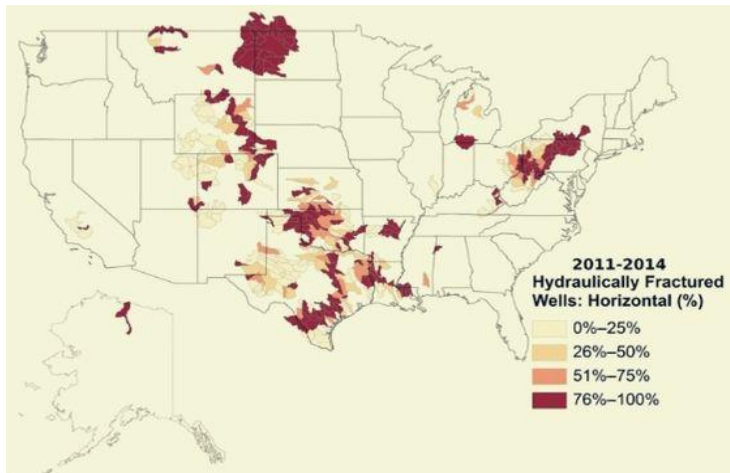
Dengan demikian, bantuan *Masrshall Plan* yang diberikan Amerika kepada Eropa Barat pasca perang tidak hanya bertujuan untuk mencegah kejatuhan Eropa ke dalam paham komunisme tetapi juga sekaligus memelihara paham kapitalisme dalam negeri dengan terus berjalannya ekonomi negara melalui ekspor sehingga standar hidup masyarakat Amerika Serikat tidak menurun. Hal ini, di sisi lain, semakin mengukuhkan peran minyak sebagai elemen tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Amerika.

***United States 21st Century Energy Renaissance dan hegemoni negara, korporasi, serta rejim ekonomi global dalam pembangunan Dakota Access Pipeline (DAPL)***

Setelah menjadi net importir minyak mentah dunia sejak berakhirnya Perang Dunia, Energy Information Administration pada Januari 2019 mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, akan menjadi net eksportir pada tahun 2020. Statemen tersebut juga merupakan revisi dari perkiraan sebelumnya pada tahun 2018 yang memprediksi bahwa Amerika Serikat akan menjadi eksportir terbesar minyak dunia pada 2022 (DiChristopher, 2019).

*Shale revolution*, gabungan antara teknik *hydraulic fracturing* dengan *horizontal drilling* merupakan kausa dibalik tingginya produksi minyak domestik Amerika Serikat sejak pertengahan dekade kedua abad 21, yang kemudian disebut sebagai *United States 21st Century Energy Renaissance* (Green, 2019).





Gambar 3.1 Peta penggunaan teknik hydraulic fracture dan horizontal drilling di Amerika Serikat.

Sumber: *U.S Geological Survey* (United States Geological survey, t.thn.)

Formasi Bakken di Dakota Utara menjadi salah satu ladang minyak yang menggunakan teknik tersebut untuk mengekstraksi minyak dari perut bumi. Dampaknya, Bakken menjadi salah satu sumber minyak penting di Amerika Serikat dengan total produksi mencapai 1.3 juta barel per hari pada September 2018 (Energy Information Administration, 2019).

Proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) menjadi salah satu instrumen penting yang menyalurkan minyak Bakken menuju pengilangan di Illinois sebelum akhirnya didistribusikan ke kawasan lain, serta diekspor ke luar negeri melalui Texas. Merampungkan pembangunan pada April 2017, konstruksi DAPL melibatkan pertentangan panjang antara negara, korporasi, serta bank dan institusi keuangan internasional sebagai aktor yang memotori pembangunan pipa, dengan aktivis lingkungan dan HAM serta masyarakat adat sebagai pihak yang menolak pembangunan karena ancaman

lingkungan juga pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai *foreign nations* dalam teritori Amerika Serikat.

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis bentuk hegemoni negara, korporasi, serta rejim ekonomi global dalam mensukseskan pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) menggunakan perspektif Gramscian.

Hegemoni, seperti yang didefinisikan oleh Antonio Gramsci, merupakan suatu bentuk penguasaan pemerintah terhadap masyarakat yang didapatkan melalui konsensus, dimana setiap keputusan dari pemerintah atau apa yang disebut Gramsci sebagai *the ruling class*, yang pada dasarnya hanya menguntungkan kelompok tersebut, disetujui oleh masyarakat luas dan dipercaya sebagai kemaslahatan bersama. Hegemoni sebenarnya merupakan persetujuan masyarakat terhadap pemerintah yang didapatkan melalui gabungan dari penyebaran ideologi, penerapan koersi, dan aspek ekonomi, meski penekanan diberikan Gramsci pada ideologi sebagai elemen utama yang menyebabkan kebijakan disetujui secara “cuma-cuma” oleh masyarakat. Persetujuan tersebut disebabkan karena masyarakat kehilangan sikap kritisnya dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan mereka karena telah terserapnya ideologi, termasuk nilai-nilai, norma, kultur, serta model konsumsi dari pemerintah sehingga masyarakat bisa memiliki *worldview* yang sama dengan pemerintah. Proses hegemonik tersebut, jelas Gramsci lebih jauh, merupakan proses yang panjang dan diraih menggunakan upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual, sampai pada fase dimana *the ruling class* berhasil menguniversalkan pandangan dunia yang mereka miliki. Hegemoni juga merupakan *the cycling process* dimana saat nilai-nilai dari pemerintah telah terinternalisasi pada masyarakat, hegemoni “dipelihara” sehingga pemerintah dapat secara terus-menerus melanggengkan kekuasaannya. Dalam prosesnya, penyebaran ideologi, moral, dan kultur dilakukan oleh agen-agen yang disebut Gramsci sebagai “masyarakat sipil” dan “masyarakat politik”. Kemompok pertama meliputi

kelompok-kelompok masyarakat, swasta, universitas, dan media massa, atau kelompok yang tidak memiliki kontrol legal atas masyarakat, sedang sebaliknya, kelompok kedua memiliki kontrol legal atas masyarakat yang meliputi institusi pemerintahan, birokrasi, undang-undang, dan pengadilan, yang juga dapat disebut sebagai negara. Meski menekankan pada ideologi, Gramsci tidak menghilangkan aspek ekonomi sebagai faktor pendorong lain yang menciptakan hegemoni (Sugiono, 2006).

## **B. Hegemoni Amerika Serikat melalui kerangka kebijakan energi domestik dalam pembangunan *Dakota Access Pipeline (DAPL)***

Pemerintahan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Trump banyak berfokus dalam pengembangan dan peningkatan produksi energi fosil. *New York Times* dalam salah satu artikelnya menuliskan bahwa “*President Trump’s call for energy dominance has been a central ambition of his administration*”. Presiden Trump, seperti yang diungkapkan artikel tersebut juga menggunakan slogan “*Golden era of American energy*” pada awal masa jabatannya (Friedman, 2018). Fokus pemerintahan pada bidang energi juga dituliskan oleh laman berita milik NPR yang mengungkapkan bahwa “membangkitkan kembali energi fosil, produksi batu bara, serta ‘mengembalikan’ pekerjaan kepada warga Amerika” telah menjadi janji Trump pada awal masa pemerintahannya, juga menjadi janjinya pada kampanye 2016 (Horsley, 2019). Kedua artikel tersebut diperkuat oleh laman milik *whitehouse.org* menuliskan bahwa fokus Amerika Serikat pada era pemerintahan ini (Presiden Trump) tidak hanya berfokus pada *energy independence*, tetapi juga *energy dominance*, serta akses terhadap energi bagi masyarakat (The White House, 2017). *Energy dominance*, seperti yang dituliskan oleh *World Energy* merujuk pada keamanan Amerika Serikat dalam aspek energi, dimana Amerika

terbebas dari segala bentuk pengaruh geopolitik negara lain yang menggunakan energi sebagai “senjata ekonomi”. *Energy dominance* juga berarti menjadikan Amerika Serikat sebagai sentral dari sistem energi global termasuk posisi Amerika sebagai produsen, konsumen, dan inovator dalam bidang energi, juga kemampuan Amerika untuk meningkatkan pengaruhnya dalam ranah internasional melalui ekspor (Hengel, 2018).

Keinginan Amerika Serikat untuk menjadi independen dalam bidang energi pada dasarnya bukan tanpa alasan. Kecenderungan Amerika Serikat terhadap impor minyak luar negeri selama beberapa dekade terakhir dipengaruhi oleh instabilitas negara pengirim baik dari segi politik dalam negeri, relasi dengan Amerika, serta apa yang disebut *Center for American Progress* sebagai *anti-American foreign policy* yang berdampak pada kerentanan keamanan nasional Amerika (Lefton & Weiss, 2010). Laman milik *Center for American Progress* juga mengungkapkan bahwa defisit perdagangan Amerika pada 2009 dipengaruhi oleh besarnya *gap* antara konsumsi minyak dalam negeri serta tingginya impor yang menghabiskan dana sebanyak US\$1 milyar per hari. Disamping itu, data menunjukkan bahwa pada tahun 2008 Amerika Serikat mengimpor dari negara-negara dengan pemerintahan yang tidak stabil termasuk Aljazair, Chad, Kolombia, Kongo, Iraq, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, dan Suriah. Kekhawatiran akan keamanan nasional Amerika Serikat juga disebabkan oleh negara eksporter minyak yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Amerika, sehingga terlepas dari siapa “pembeli” minyak negaranya, negara tersebut akan tetap mendapatkan untung (Lefton & Weiss, 2010).

Pada paruh awal dekade kedua abad 21 impor minyak Amerika masih cukup tinggi. Mengutip dari laman milik *Energy Information Administration* (EIA), impor Amerika Serikat pada tahun 2014 mencapai 9.24 juta barel per hari. Sedang pada tahun 2015 dan 2016 impor Amerika Serikat

terhadap minyak luar negeri masing-masing sebanyak 9.5 serta 10 juta barel per hari (Energy Information Administration, 2019). Di sisi lain, pada kurun waktu yang sama produksi bahan bakar fosil di Amerika Serikat mengalami peningkatan yang pesat setelah ditemukannya tehnik *hydraulic fracture* dan *horizontal drill* yang memungkinkan pengambilan minyak dari fosil yang “terjebak” di dalam batuan (London School of Economic and Political Science, 2018) Gabungan teknik tersebut kemudian banyak diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan pada sumur-sumur minyak Amerika Serikat. Peningkatan produksi energi Amerika Serikat sangat signifikan, dimana estimasi produksi minyak dan energi fosil Amerika akan terus meningkat hingga beberapa dekade ke depan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Trump untuk beralih dari impor pada produksi energi domestik yang secara ekonomi akan sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat, seperti yang diungkapkan Trump bahwa pemerintahannya akan memaksimalkan penggunaan sumber daya Amerika Serikat, termasuk memanfaatkan energi domestik yang luas dan belum dimanfaatkan oleh Amerika (Labor Network for Sustainability, 2018). Ladang Bakken menjadi salah satu sumur minyak Amerika yang mengalami peningkatan produksi pesat atas ditemukannya gabungan tehnik *hydraulic fracture* dan *horizontal drill*. Dalam hal ini, *Dakota Access Pipeline* (DAPL) menjadi media penting untuk menyalurkan lonjakan produksi minyak Bakken dengan pengilangan di Illinois sebelum akhirnya disalurkan pada sektor-sektor yang membutuhkan dan di ekspor ke luar negeri (Clemente, 2018).

Dalam meningkatkan produksi minyak Amerika, Trump bekerja sama dengan perusahaan dan korporasi untuk mengekstraksi minyak dari sumber-sumber minyak, termasuk membuka *rig* baru dari sumur minyak di Amerika Serikat. Presiden Trump juga membuka jutaan acre tanah federal untuk keperluan eksplorasi minyak, serta membatalkan kebijakan-kebijakan iklim pada administrasi pemerintahannya sebelumnya yang disebut Presiden Trump sebagai “*job killer*” (Lipton &

Tabuchi, 2018). Pada langkah yang lebih jauh, Trump memutuskan untuk keluar dari *Paris Agreement* pada pertengahan tahun 2017 (European Parliament Think Tank, 2017).

Di sisi lain, pembangunan pipa Dakota Utara – Illinois tersebut ditentang habis-habisan oleh kelompok adat dan aktivis lingkungan. Gelombang protes yang tinggi dan berlangsung bulanan dengan membangun kamp-kamp di kawasan pembangunan pipa menjadi hal yang paling mencolok dalam pembangunan DAPL, dimana kebijakan energi domestik bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok minoritas. Meski demikian, suara Amerika Serikat melalui narasi “*energy independence*” dan “*energy dominance*” lebih dominan, yang kemudian membungkam suara masyarakat adat dan kelompok aktivis yang mengatakan bahwa “*Mni Wiconi*”, air adalah kehidupan.

Protes masyarakat adat disebabkan adanya pemindahan rute pipa dari kawasan Bismarck, Ibu Kota Dakota Utara ke kawasan sungai Missouri yang hanya berjarak setengah mil dari reservasi masyarakat adat. Pemindahan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Dave Archambault II, ketua dari masyarakat Standing Rock, adalah karena mayoritas masyarakat di Bismarck menolak pembangunan di kawasan tersebut karena khawatir akan pencemaran terhadap sumber air minum. Dave mengungkapkan bahwa alasan yang sama digunakan masyarakat adat, namun pembangunan pipa tetap berlanjut (Thorbecke c. , 2016). Pemindahan rute tersebut, berdampak pada permasalahan lain. Berdasarkan perjanjian *Fort Laramie* 1851, rute “pindahan” dari Bismarck tersebut berada dalam teritori suku adat yang, meskipun menurut undang-undang tanah tersebut merupakan milik pemerintah, tidak pernah diserahkan secara resmi kepada pemerintah federal. Terkait hal tersebut, Kyle Whyte, seorang profesor di *Michigan State University* menyebut pembangunan pipa sebagai “*kolonialisme deja vu*”, dimana masyarakat adat masih mengalami hal yang

sama bahkan setelah ratusan tahun lalu mengalaminya: penyerahan tanah secara paksa kepada pemerintah federal (Whyte, 2017). Pembangunan di kawasan danau Oahe, di sisi lain, akan mengancam hak berburu dan hak menangkap ikan (*hunting rights and fishing rights*) yang merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat adat sebagai *first nation* (Hanvey, 2017). Pembangunan pipa juga menodai nilai *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dari *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) yang sekaligus menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam *American Declaration on the Rights of Indigenous People*. FPIC sendiri mensyaratkan keterlibatan, termasuk konsultasi dan negosiasi, serta persetujuan masyarakat adat dalam kebijakan yang berdampak pada suku adat (Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, 2013).

Hal lain yang mendasari penolakan pembangunan pipa di kawasan danau Oahe adalah nilai-nilai yang dipegang suku Indian mengenai tempat keramat. Rosalyn R. LaPier menjelaskan bahwa suku Indian di Amerika Utara mempercayai apa yang disebut sebagai tempat suci atau tempat keramat. Tempat-tempat tersebut terbagi menjadi dua: rumah bagi para dewa, serta tempat untuk mengingat mereka yang telah pergi. *The sacred place* meliputi tempat-tempat yang jauh dari kehadiran manusia seperti gunung, padang rumput, sungai, serta tanah pemakaman. Tanah masyarakat adat yang dilewati pipa milik *Energy Transfer Partners* dipercaya masyarakat adat sebagai tanah yang dikeramatkan, dimana leluhur dari suku Indian dimakamkan di kawasan tersebut. Dalam kasus ini, pipa *Dakota Access Pipeline* (DAPL) melewati tanah pemakaman, sungai, dan padang rumput sekaligus, apa yang disebut masyarakat Standing Rock sebagai “*sacred place*”. Menanggapi hal ini, Rosalyn R. LaPier mengatakan bahwa pemerintah federal telah gagal memahami nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh suku adat selama ratusan tahun, diskriminasi terhadap kepercayaan masyarakat adat (LaPier, 2016).

*Pivoting into domestic energy production* pada era pemerintahan Trump, bagaimanapun, menyerap tenaga kerja dan menurunkan kecenderungan impor Amerika Serikat terhadap *foreign oil*. Dalam pidatonya pada acara “*Unleashing American Energy*” pertengahan tahun 2017, Trump mengungkapkan bahwa “***Our country will no longer be vulnerable to foreign regimes that use energy as an economic weapon; American families will have access to cheaper energy, allowing them to keep more of their hard-earned dollars; and our workers will have access to more jobs and opportunities***”. “Amerika Serikat tidak lagi rentan terhadap “rejim luar” yang menggunakan energi sebagai senjata ekonomi; keluarga keluarga Amerika akan memiliki akses pada energi yang lebih murah yang memungkinkan mereka untuk menyimpan lebih banyak hasil jerih payah dan para pekerja akan memiliki lebih banyak akses pada pekerjaan dan peluang” (The White House, 2017).

Keinginan untuk tidak berada dalam kontrol negara lain, terutama dalam hal energi, serta ambisi untuk menjadi sentral dari produksi energi dunia menjadi prekondisi dari munculnya narasi *energy independence* dan *energy dominance* yang dalam kasus pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) digunakan untuk menciptakan *worldview* bahwa produksi energi fosil akan menguntungkan, bukan hanya bagi negara, melainkan juga warga Amerika dengan ketersediaan suplai minyak serta rendahnya biaya energi disamping penyerapan tenaga kerja. *Worldview* tersebut dalam kasus DAPL tidak hanya disebarkan melalui narasi-narasi mengenai energi, tetapi melibatkan peran berbagai elemen negara dan masyarakat sipil, termasuk peran aktif korporasi dan rejim ekonomi global dalam meningkatkan kesejahteraan warga Amerika Serikat yang dengan demikian menghasilkan kepatuhan dan norma bagi publik.



***Kampanye energy independence dalam pembangunan Dakota Access Pipeline (DAPL)***

*Energy independence* atau kemandirian energi mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi cukup energi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi energi di negara tersebut. Dalam pengertian yang lain, *energy independence* juga berarti kemampuan suatu negara untuk terbebas dari segala bentuk impor sumber energi (TIME, 2012).

*Energy independence* pertama kali diserukan di Amerika Serikat oleh Presiden Richard Nixon setelah Amerika mengalami krisis minyak pada awal dekade '70-an. Besarnya ketergantungan Amerika Serikat akan minyak Timur Tengah pada kurun waktu tersebut berbenturan dengan kepentingan luar negeri Amerika di Israel. Dampaknya, negara-negara Teluk mengembargo suplai minyak ke Amerika Serikat. *Energy independence*, kemudian, menjadi narasi yang selalu disinggung oleh politikus dan Presiden Amerika Serikat, termasuk dalam pembangunan proyek energi domestik *Dakota Access Pipeline* (DAPL).

Hegemoni negara dalam pembangunan pipa minyak *Dakota Access Pipeline* (DAPL) juga menggunakan narasi kemandirian energi untuk mensukseskan pembangunan pipa yang “linier dengan kepentingan Amerika Serikat” (BBC, 2017). Dalam praktiknya, negara secara aktif melibatkan peran agen-agen yang disebut Gramsci sebagai “masyarakat sosial” dan “masyarakat politik”. Masing-masing dari agen suprastruktur tersebut membentuk dan mematenkan narasi kemandirian energi melalui pembentukan diskursus, kebijakan publik, hingga penggunaan elemen kekuatan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan pipa.

Kemandirian energi pada dasarnya menjadi aspek yang ditekankan Trump sejak pertama kali menjabat sebagai presiden. Sesaat setelah menduduki kursi kepresidenan Trump mengeluarkan *America First Energy Plan* yang tujuannya adalah mempercepat terciptanya kemandirian energi bagi Amerika Serikat. *America First Energy Plan* merupakan kerangka utama yang akan menghidupkan kembali dan meningkatkan produksi sumber energi fosil di Amerika, termasuk minyak, gas, serta batu bara. Dokumen milik *Atlantic Council* yang berjudul *The America First Energy Plan: Renewing the Confidence of American Energy Producers* menyebutkan bahwa *America First Energy Plan* akan berfokus pada tiga hal, yakni memperluas aktivitas ekstraksi bahan bakar fosil yang akan membuka lapangan kerja bagi warga Amerika Serikat dan mempercepat kemandirian energi, menghidupkan kembali industri batu bara di Amerika Serikat, serta membatalkan kebijakan yang menghambat peningkatan produksi energi dari era sebelumnya termasuk *Climate Action Plan* dan *Water of the US rule*, seperti yang disebut dalam artikel sebagai “*less regulation, more drilling*” (Vakhshouri, 2017). Membahas mengenai *America First Energy Plan*, sebuah artikel milik *Business Insider* menuliskan bahwa Amerika Serikat masih memiliki potensi sumber-sumber energi yang belum dimanfaatkan, yang memiliki estimasi keuntungan hingga US\$50 triliun. Artikel tersebut juga mengungkapkan bagaimana peningkatan produksi energi domestik sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat untuk dapat melepaskan ketergantungannya terhadap minyak dari OPEC dan negara-negara Teluk (Garber, 2017).

Narasi mengenai kemandirian energi juga disuarakan oleh Departemen Energi Amerika Serikat. Departemen Energi, melalui siaran langsung di “*Energy Matters*”, sebuah program televisi Amerika mengungkapkan mengapa kemandirian energi, khususnya minyak, merupakan aspek yang sangat krusial bagi Amerika Serikat. Di dalam program *Energy Matters*, Departemen Energi menjelaskan bahwa masa depan

Amerika ditentukan oleh tiga aspek penting yakni kemandirian nasional, keamanan atau kesejahteraan ekonomi, serta keamanan lingkungan. Meski demikian, Departemen Energi menyoroti bahwa pada dekade kedua abad 21 masih terdapat banyak celah pada ketiga aspek tersebut. Impor minyak Amerika Serikat, ungkap Departemen Energi mencapai lebih dari 50% total konsumsi minyak Amerika Serikat dan menghabiskan dana hingga US\$300 milyar per tahun. Hal ini, ungkapnya, bukan hanya ancaman bagi keamanan Amerika Serikat, melainkan ancaman bagi kesejahteraan ekonomi sekaligus. Departemen Energi juga menambahkan bahwa sektor transportasi Amerika Serikat hanya menggunakan minyak sebagai bahan bakar sehingga kebutuhan Amerika akan minyak akan selalu tinggi. Impor minyak yang tinggi akan menyebabkan Amerika Serikat selalu bergantung pada suplai minyak dari negara lain yang sekaligus membuat pengeluaran Amerika dalam bidang energi membengkak. Departemen Energi, kemudian, membalikkan kemungkinan yang akan terjadi bila dana yang dikeluarkan Amerika untuk impor minyak dari negara lain digunakan untuk membeli minyak dari dalam negeri. Hal itu, ungkap Departemen Energi lebih jauh, tentu akan menciptakan kesempatan kerja bagi warga Amerika Serikat yang akan menyumbang pada kesejahteraan ekonomi Amerika (U.S. Department of Energy, t.thn.).

Meski demikian, Departemen Energi juga menggarisbawahi bagaimana inovasi teknologi untuk menciptakan *clean energy* juga terus dilakukan, sehingga Amerika, nantinya, tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kemandirian nasional dan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga energi dengan dampak negatif yang minimum bagi lingkungan (U.S. Department of Energy, t.thn.).

Narasi-narasi lain yang membahas mengenai pentingnya kemandirian energi juga diungkapkan oleh *the Ecologist* yang menyebut bahwa selain memberikan dampak positif bagi ekonomi karena biaya energi menjadi lebih murah,

kemandirian energi juga menguntungkan akan menguntungkan Amerika Serikat dari segi geopolitik. Amerika Serikat, untkapnya, selama ini bergantung pada impor minyak dari kawasan lain, yang menyulitkan posisi Amerika Serikat saat kepentingan negara-negara pengimpor minyak berbenturan dengan kepentingan Amerika. *The Ecologist* mengutip bagaimana dependensi negara-negara Eropa terhadap impor minyak kawasan lain membuat negara tersebut tidak memberikan reaksi apapun saat Rusia menganeksasi Krimea pada 2014 silam (Folk, 2018).

Kemandirian energi pada mulanya merupakan narasi yang diusung oleh Presiden Richard Nixon menanggapi embargo minyak yang dihadapi Amerika Serikat dan sekutu pada tahun 1973 yang menyebabkan krisis minyak. Meski demikian narasi kemandirian energi atau *energy independence*, yang telah mengakar pada masyarakat Amerika, kemudian dijadikan diskursus oleh Amerika Serikat untuk melanggengkan pembangunan energi serta infrastruktur pendukungnya termasuk *Dakota Access Pipeline* (DAPL); apa yang disebut Gramsci sebagai elemen suprastruktur.

Negara, selain menggunakan elemen masyarakat sipil dalam menyebarkan worldview the ruling class kepada masyarakat, juga menggunakan elemen kekuatan. Amerika Serikat dalam hal ini, disamping menyebarkan diskursus mengenai *energy independence* melalui “masyarakat sipil”, juga menghegemoni masyarakat melalui “masyarakat politik” yang terdiri dari aparatur negara yang secara legal memiliki wewenang untuk memerintah dan menggunakan elemen kekuatan dalam praktiknya (Sugiono, 2006).

Pada tanggal 24 Januari 2017, Trump mengeluarkan *president's executive order* mengenai percepatan pengkajian ulang lingkungan dan persetujuan untuk proyek infrastruktur (*Expediting Environmental Reviews and Approvals for High-Priority Infrastructure Projects*) yang merupakan tanggapan atas kasus *Dakota Access Pipeline* (DAPL). Sebelumnya,

konstruksi proyek pipa dalam negeri tersebut mengalami jeda akibat kekhawatiran adanya pencemaran lingkungan, terutama pada bagian pipa yang akan ditanam di bawah Danau Oahe sehingga berpotensi membahayakan masyarakat Standing Rock yang mengandalkan air danau tersebut menjadi satu-satunya sumber air minum. Kekhawatiran tersebut kemudian membuat Obama mengeluarkan keputusan untuk menjeda pembangunan pipa; menghentikan pembangunan sementara dan meminta *United States Army Corps of Engineer* (USACE) sebagai badan yang bertanggung jawab untuk memberikan perizinan pembangunan infrastruktur untuk melakukan pengkajian ulang (*reassessment*) terkait keamanan lingkungan di kawasan danau Oahe dan kemungkinan untuk melakukan *pipeline reroute* untuk menghindari kawasan danau.

Executive order dari Trump pada bulan Januari diikuti dengan “*easement grant*” dari *United States Army Corps of Engineer* (USACE) yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan pipa pada 8 Februari. *Easement grant*, seperti yang dituliskan dalam laman milik Cornell Law School: “***An easement is the grant of a nonpossessory property interest that grants the easement holder permission to use another person's land***”. Easement merupakan pemberian izin atas tanah yang tidak berkepemilikan kepada pihak lain untuk menggunakannya (Legal Information Institute, t.thn.). Pemberian *easement* tersebut ditanggapi positif oleh kelompok proponen pipa dan berhasil menghentikan periode “jeda” sejak akhir kepemimpinan Presiden Obama. Dalam statemennya, Trump menyebut bahwa pembangunan pipa-pipa minyak diperlukan untuk dapat menyalurkan hasil produksi energi domestik Amerika minyak ke pasaran yang lebih luas. Hal ini, menurutnya, juga sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat untuk mencapai independensi energi (BBC, 2017). Dengan keputusan dari USACE, pihak korporasi dapat kembali melanjutkan pembangunan pipa yang akan melewati kawasan danau Oahe (The Associated Press, 2017).

Penggunaan elemen kekuatan juga terlihat pada pembangunan proyek pipa sendiri, dimana angkatan bersenjata nasional, termasuk polisi, diturunkan untuk mengamankan pembangunan pipa dan pekerja proyek. The Guardian, sebuah media internasional yang turut meliput protes di kawasan pembangunan pipa, mengungkapkan bahwa pengamanan melibatkan polisi serta helikopter yang mengawasi area sekitar pembangunan. Polisi menggunakan water cannon dan peluru karet untuk meredakan protes dari kelompok oponent pipa, bahkan pada saat suhu mendekati minus derajat (Lafleur-Vetter & Klett, 2016). Intimidasi terhadap pemrotes juga dilakukan melalui penggunaan *pepper spray* serta penangkapan terhadap 141 pemrotes, termasuk jurnalis lepas yang meliput kontroversi pembangunan di Dakota Utara (Foster, 2016)

Hegemoni Amerika Serikat dalam pembangunan proyek *Dakota Access Pipeline* turut melibatkan dua aktor suprastruktur “masyarakat sipil” dan “masyarakat politik” milik Gramsci. Agen-agen tersebut pada satu sisi menyebarkan narasi dan diskursus mengenai kemandirian energi, atau apa yang disebut Louis Althusser sebagai *Ideological State Apparatus* (ISA) yang mempengaruhi sudut pandang masyarakat tentang kebutuhan Amerika terhadap energi, terutama minyak, dan di sisi lain menggunakan elemen kekuatan, apa yang disebut Althusser sebagai *Repressive State Apparatus* (RSA), melalui *president's executive order*, keputusan USACE sebagai pihak yang berwenang memberikan izin pembangunan pipa, serta agen-agen yang secara legal hukum memiliki wewenang termasuk polisi dan angkatan bersenjata untuk memberikan *fear effect* dalam mengamankan pembangunan proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) (Leitch, 2001).

### C. Hegemoni Korporasi melalui *petro-hegemony* dalam pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL)

*Energy Transfer Partners* pertama kali mengajukan proposal rute pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) pada akhir tahun 2014 yang selanjutnya disusul dengan agenda *public hearing* dengan masyarakat terdampak terkait konstruksi pipa minyak. Pertentangan yang dihadapi oleh korporasi cukup besar yang salah satunya disebabkan oleh perubahan rute pipa dari Bismarck, yang ditolak oleh masyarakat kulit putih setempat karena kekhawatiran kontaminasi terhadap sumber air, menuju dekat kawasan reservasi masyarakat Indian Amerika, Standing Rock, yang juga berpotensi mencemari kawasan danau Oahe. Hal ini kemudian disebut *healthaffair.org* sebagai bentuk *environmental racism*.

Besarnya kontroversi pembangunan pipa kemudian menyebabkan konstruksi pipa terhenti dan melewati tenggat waktu pembangunan yang direncanakan, yakni pada 1 Januari 2017. Meski demikian, upaya-upaya yang dilakukan korporasi berhasil mengalahkan narasi yang dibawa oleh kelompok oposisi termasuk aktivis lingkungan, pemilik lahan serta *water protectors*, sebagaimana suku adat menyebut diri mereka demikian, mengenai ancaman keamanan lingkungan, *environmental racism*, serta pelanggaran hak-hak suku adat dan berhasil merampungkan pembangunan pipa pada April 2017.

Theo LeQuesne dalam jurnal *Environmental Sociology* menyebutkan ketergantungan negara akan minyak dan lekatnya korporasi dengan profit menyebabkan terciptanya “*petro-hegemony*” pada kedua aktor tersebut. Dalam kasus *Dakota Access Pipeline* (DAPL), hegemoni industri minyak melibatkan penyebaran ideologi yang meliputi kultur, identitas, mode konsumsi, serta *worldview* yang dalam perspektif Gramscian disebut sebagai suprastruktur (Sugiono,

2006). LeQuesne mengungkapkan terdapat aspek *petro-culture* dan *spetro-capitalist* dalam hegemoni industri minyak, yang dalam kasus DAPL memiliki dampak signifikan pada penerimaan masyarakat terhadap pembangunan pipa. Kultur minyak atau *petro-culture*, sebut LeQuesne, menggambarkan bagaimana industri minyak memperoleh persetujuan dari masyarakat atas aktivitas industri perusahaan, yang dengan demikian mencakup serta minyak yang mereka produksi, melalui langkah-langkah yang membentuk diskursus dominan akan minyak. Diskursus tersebut melibatkan penciptaan identitas serta pembentukan *worldview* mengenai urgensi minyak. Dalam praktiknya, industri minyak dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan filantropi, kampanye, menjadi sponsor dalam program pendidikan, serta terlibat dalam kegiatan konservasi lingkungan (LeQuesne, 2018).

Dalam kasus *Dakota Access Pipeline* (DAPL), pihak industri minyak menyebarkan narasi-narasi yang mengungkapkan bahwa minyak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dakota Utara. *Dakota Access LLC* dalam *daplpipelinefactsheet*, dokumen yang menjelaskan rincian pembangunan pipa DAPL, menyebutkan bahwa formasi Bakken yang berada di bawah tanah North Dakota menyimpan cadangan minyak yang mampu menyumbang kemandirian Energi Amerika Serikat. *Factsheet* dari *Dakota Access LLC* didukung oleh data yang menunjukkan bahwa peningkatan produksi minyak Bakken dari tahun ke tahun berdampak positif terhadap ekonomi dan menjadikan Dakota Utara sebagai negara bagian dengan rata-rata pendapatan tahunan melampaui total rata-rata pendapatan Amerika Serikat (Energy Information Administration, 2013). Laman milik *Energy of North Dakota* juga menunjukkan bagaimana Dakota Utara dan Amerika Serikat diuntungkan dengan adanya industri energi di kawasan tersebut (Energy of North Dakota, 2019). Hal ini, membentuk apa yang disebut Gramsci sebagai identitas, pembentukan kultur bahwa minyak merupakan bagian dari masyarakat, sehingga kepentingan industri minyak untuk



mengekstraksi minyak dari Bakken menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat karena bagian dari komunitas mereka turut menyumbang pada kemajuan kawasan.

*Energy Transfer Partners* (ETP) juga terlibat dalam kegiatan filantropi melalui program *community investment*. Salah satu bentuk kegiatan filantropi yang dilakukan *Energy Transfer Partners* adalah memberikan pendanaan terhadap penelitian penting terkait kanker pada anak di MD Anderson Children's Cancer Hospital sejak tahun 2014. Data terakhir dari laman tersebut menunjukkan jumlah bantuan dana yang diberikan oleh perusahaan minyak mencapai US\$4.5 juta. Melalui lamanya, *energytransfer.com*, ETP juga menginformasikan bagaimana pihaknya secara aktif terlibat dalam memberikan bantuan bencana, dukungan terhadap kesehatan, serta bantuan lingkungan. Laman utama *community investment* milik *Energy Transfer Partners* bertuliskan “*your community is our community*” yang secara tegas menyatakan bahwa perusahaan merupakan bagian integral dari masyarakat Amerika Serikat (Energy Transfer, 2019). Dalam hal ini, ETP sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas konstruksi pipa banyak terlibat dalam pembangunan masyarakat baik melalui bantuan dalam bidang pendidikan, penelitian, pasca bencana maupun pada bidang lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam pembangunan masyarakat, bagaimanapun, akan menciptakan penerimaan warga terhadap korporasi, karena korporasi merupakan bagian integral yang turut berperan dalam membangun masyarakat.

Disamping membentuk opini bahwa minyak merupakan bagian dari masyarakat, *Energy Transfer Partners* (ETP) mengampanyekan penting dan krusialnya peran minyak bagi masyarakat. Melalui *youtube channel* miliknya, ETP menunjukkan bagaimana minyak telah menjadi bagian yang membentuk keseharian masyarakat. Minyak, seperti yang diungkapkan ETP, terkandung dalam berbagai produk kebutuhan sehari-hari termasuk deterjen pakaian, kosmetik, perabot perlengkapan rumah, hingga pupuk organik. Pada

aspek lain, minyak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari listrik, transportasi, kebutuhan rumah tangga. Minyak, juga, memiliki andil besar dalam bidang edukasi, kesehatan juga fasilitas-fasilitas publik (Energy Transfer Partners, 2018).

Aspek lain yang disinggung oleh perusahaan adalah kemanan lingkungan dari pengiriman minyak melalui pipa-pipa. *Energy Transfer Partners* (ETP) menggarisbawahi bagaimana pipa minyak telah mengambil peran krusial dalam distribusi minyak di Amerika Serikat sejak paruh akhir abad 19. Statemen tersebut didukung oleh laman youtube milik *Business Insider* yang menunjukkan persebaran pipa minyak dan gas di Amerika Serikat (Business Insider, 2015). ETP, melalui laman *Dakota Access Pipeline Facts* juga menekankan aspek keamanan pipa dengan mengutip data statistik milik pemerintah federal yang menyatakan bahwa pengiriman minyak menggunakan pipa jauh lebih aman dibandingkan dengan media transportasi lain seperti kereta dan truk. Dalam laman tersebut, ETP juga memastikan bahwa pihaknya mengutamakan kemanan lingkungan dengan menggunakan teknologi termutakhir dan pipa yang melebihi standar minimal yang disyaratkan pemerintah federal untuk dapat mengalirkan minyak. Sedang dalam menanggapi kekhawatiran aktivis lingkungan yang mengatakan kemungkinan pencemaran di Danau Oahe, ETP mengungkapkan bahwa faktanya, terdapat pipa lain yang juga berada di bawah badan danau yang telah beroperasi sejak puluhan tahun dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. ETP menyebut bagaimana pipa miliknya akan ditanam dengan kedalaman yang lebih jauh dari pipa terdahulu untuk meminimalisir kemungkinan kontaminasi minyak terhadap air danau (Energy Transfer LP, 2017).

Pada dua aspek diatas, pihak korporasi membentuk legitimasi atas masyarakat mengenai esensialnya peran minyak dan pipa-pipa yang menyalurkan komoditas tersebut dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana pipa milik *Energy Transfer Partners* (ETP) juga memandang penting

aspek keamanan lingkungan dengan memperhitungkan dengan matang segala bentuk kemungkinan kecelakaan pengiriman yang dicegah melalui langkah-langkah preventif termasuk melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah federal bagi pipa minyak.

Aspek lain dari *petro-hegemony*, ujar LeQuesne, adalah *petro-capitalist* yang menunjukkan ketergantungan ekonomi-politik abad 21 pada komoditas minyak. Hal ini menyangkut kemampuan industri minyak dalam membentuk ekonomi lokal dengan membentuk narasi bahwa minyak menjadi sumber ekonomi yang dapat diandalkan, serta menyediakan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan, bantuan dana, rendahnya biaya energi, serta dukungan terhadap pembangunan lokal yang berdampak pada penerimaan terhadap minyak dan infrastruktur pendukungnya sebagai akibat dari bergantungnya masyarakat pada komoditas tersebut baik dari segi mata pencaharian maupun fasilitas dan kemudahan yang disediakan oleh korporasi bagi publik (LeQuesne, 2018).

Data dari *Energy Information Administration* (EIA) menunjukkan bahwa meningkatnya produksi minyak Bakken di Dakota Utara sejak dekade pertama abad 21 menyumbang pada tingginya *GDP* Dakota Utara. Pada 2012, *GDP* negara bagian tersebut melampaui hingga 29% *GDP* nasional. Meningkatnya aktivitas industri di Dakota Utara yang disebabkan oleh tingginya produksi minyak, ungkap EIA lebih jauh, berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan padatnya populasi di Dakota Utara, yang turut membangun ekonomi lokal (Energy Information Administration, 2013).

Di sisi lain, pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) yang memakan dana hingga US\$ 3.8 milyar ungkap pihak perusahaan melalui *dapipelinefactsheet* akan menyerap tenaga kerja sebanyak 8.000 hingga 12.000 selama proses pengerjaan. *Energy Transfer Partners* juga mengeluarkan statemen bahwa perusahaan akan menjalin kerja

sama dengan berbagai pihak termasuk industri manufaktur pipa baja, katup, serta perangkat kontrol yang dibutuhkan untuk pipa, setelah mengonfirmasi bahwa pipa DAPL menggunakan material buatan dalam negeri. Konstruksi pipa, unkap ETP lebih jauh, juga akan berdampak pada meluasnya penggunaan layanan penginapan, restoran, serta layanan-layanan lain.

*Energy Transfer Partners* (ETP) juga bekerja sama dengan Strategic Economics Group, konsultan ekonomi dan perencanaan untuk mengkaji dampak ekonomi dari pembangunan pipa. Studi dari Strategic Economics Group sendiri menyatakan bahwa konstruksi DAPL akan berdampak positif bagi ekonomi negara bagian termasuk dalam aspek penciptaan pekerjaan yang akan diisi oleh pekerja konstruksi (39%), layanan teknik dan arsitektur (6%), sedang sisanya merupakan layanan makanan serta layanan *real estate* dan ketenagakerjaan. Peningkatan jumlah pekerjaan juga berdampak pada upah tenaga kerja dengan estimasi hingga US\$1.9 milyar, serta produksi dan penjualan di keempat negara bagian mencapai US\$5 milyar.

Di sisi lain, pihak perusahaan memiliki program *community investment*, dimana melalui program tersebut *Energy Transfer Partners* terlibat aktif dalam bantuan pendanaan sekolah dan universitas, bantuan bencana, dana bagi pengembangan penelitian di bidang kesehatan, kegiatan *volunteer*, konservasi lingkungan, hingga sponsor bagi tim olah raga lokal. Dalam program-program tersebut ETP bekerja sama dengan Palang Merah Amerika, Ducks Unlimited, Mercy Street, hingga Interfaith Ministries for Greater Houston (Energy Transfer, 2019).

Dalam aspek *petro-capitalist*, minyak menjadi komoditas yang secara konkrit memberikan keuntungan ekonomi bagi negara bagian, dan di sisi lain, pihak korporasi menyediakan aspek-aspek kebutuhan masyarakat berupa lapangan kerja, serta bantuan finansial termasuk dalam bidang

penelitian, sponsor terhadap komunitas lokal, serta bantuan pasca bencana. *Petro-capitalist* sejalan dengan argumen Gramsci dimana aspek ekonomi sebagai bagian dari substruktur, turut mengambil peran dalam pembentukan hegemoni.

*Energy Transfer Partners* (ETP) sebagai aktor dalam pembangunan proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) menghegemoni masyarakat melalui penyebaran *worldview* mengenai signifikansi minyak melalui pembentukan diskursus tentang kelaziman minyak, bagaimana minyak telah terintegrasi dan membentuk kehidupan masyarakat. Pihak perusahaan juga melegitimasi posisinya atas masyarakat dengan secara aktif terlibat dalam program-program filantropis, serta kampanye akan keamanan penggunaan pipa minyak dengan menyediakan informasi mengenai pipa DAPL, yang dalam skripsi ini dikelompokkan ke dalam *petro-culture* dan *petro-capitalist*. Dalam pembentukan *worldview* yang berdampak pada persetujuan atas pembangunan pipa DAPL, korporasi menggunakan elemen-elemen yang disebut Gramsci sebagai “masyarakat sipil” berupa asosiasi, organisasi non-pemerintah, serta media massa.

#### **D. Hegemoni Rejim Ekonomi Global melalui kerangka *Environmental and Social Risk Management* (ESRM) dalam pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL)**

Selain negara dan korporasi, aktor lain yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) adalah institusi-institusi keuangan internasional yang mendanai pembangunan proyek pipa. Dalam kasus DAPL sendiri, institusi-institusi keuangan yang berperan sebagai investor proyek mendapatkan perlawanan keras, terutama dari *International Non-Governmental Organization* (INGO) seperti BankTrack, Earthjustice, dan

Greenpeace melalui pengiriman surat terbuka untuk melakukan divestasi dari proyek tersebut. Tagar #DivestDAPL juga digunakan secara luas untuk melahirkan kesadaran publik mengenai krusialnya peran institusi finansial dalam sebuah proyek infrastruktur.

Dalam proyek pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL), rejim ekonomi global yang terdiri dari institusi-institusi keuangan internasional juga menghegemoni publik melalui elemen “masyarakat sipil”. Namun demikian, sebagai aktor ketiga dari proyek pembangunan pipa, bentuk hegemoni dari rejim ekonomi global lebih pada penyebaran narasi kerangka kerja yang telah diaopsi oleh institusi-institusi keuangan internasional berupa elemen keamanan sosial dan lingkungan untuk melegitimasi keamanan pembangunan infrastruktur, yakni *Environmental and Social Risk Management* (ESRM). *International Finance Corporation* (IFC), bagian dari *World Bank Group*, mendefinisikan *Environmental and Social Risk* sebagai risiko yang dihadapi institusi keuangan dari pendanaan proyek klien yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial yang mencakup polusi lingkungan, ancaman kesehatan, keamanan proyek, hingga dampak bagi penduduk lokal terdampak pembangunan yang dapat menyebabkan hilangnya aset, minimnya keuntungan, hingga kerusakan reputasi dari institusi finansial (FIRST for Sustainability, 2019). Sedang *Environmental and Social Risk Management* (ESRM), merupakan salah satu kerangka kerja yang diadopsi oleh institusi keuangan global untuk memastikan dan memberi akuntabilitas kepada publik bahwa proyek yang mereka danai telah memenuhi aspek-aspek yang menjamin keamanan lingkungan dan sosial. Aspek yang menjadi perhatian dalam ESRM termasuk perubahan iklim, HAM, masyarakat adat, serta keterlibatan serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses ESRM. Salah satu dokumen milik Wells Fargo menyebutkan uji kelayakan dalam kerangka ESRM mencakup identifikasi proyek, penilaian, serta pertimbangan akan keamanan proyek bagi lingkungan

dan masyarakat sebelum pihak institusi keuangan memutuskan untuk mendanai proyek (Wells Fargo, 2018).

*Environmental and Social Risk Management* (ESRM) menjadi narasi yang banyak digunakan oleh institusi-institusi finansial investor dari proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) untuk melegitimasi pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) bahwa proyek tersebut aman dan telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kerangka ESRM.

Wells Fargo menjadi salah satu institusi finansial yang mendanai secara langsung proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL). Saham Wells Fargo pada proyek tersebut adalah 4.8% atau sekitar US\$120 juta (Thompson, 2017). Melalui statemen terbuka, Wells Fargo menanggapi kontroversi yang terjadi pada pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) Wells Fargo mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari *Equator Principles Financial Institutions* (EPFIs) pihaknya telah bekerja sama dengan badan independen guna melakukan pengkajian terhadap proyek pipa melalui uji kelayakan untuk memastikan bahwa proyek yang mereka danai telah sesuai dengan undang-undang setempat, negara bagian, dan federal, serta bahwa seluruh potensi dampak terhadap lingkungan dan kultur telah ditangani. Dalam laman *Corporate Social Responsibility*, pihak Wells Fargo menyatakan bahwa “*..our objective is to ensure that the financial services we provide do not facilitate unacceptable impacts on communities or the environment. If we do not believe a company can effectively manage elevated environmental and social risks in their operations we will decline participation in the transaction..*”. “Tujuan kami adalah memastikan bahwa layanan finansial yang kami berikan tidak memberikan dampak yang tidak dapat diterima bagi masyarakat maupun lingkungan. Jika (pihak) kami tidak yakin bahwa perusahaan dapat secara efektif mengelola peningkatan risiko lingkungan dan sosial selama proses operasi mereka, kami akan membatalkan partisipasi

(bantuan finansial) dalam transaksi (kerja sama) (Wells Fargo, 2017).

Di sisi lain, Wells Fargo menggarisbawahi bagaimana pihaknya telah bekerja sama dan menjadi mitra yang baik bagi suku adat selama lebih dari 50 tahun. Wells Fargo sendiri juga terlibat dalam bantuan finansial dalam bidang edukasi bagi pelajar dengan latar belakang suku adat, program pembangunan termasuk bantuan bagi pelaku usaha dari suku adat, mensponsori subsidi *affordable housing plan* bagi suku adat, kredit perumahan murah, serta bantuan filantropis melalui organisasi non-profit yang secara khusus berfokus pada kelompok dan individu dari masyarakat adat. Meski demikian Wells Fargo tidak menarik sahamnya dari proyek DAPL dan mengharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mencapai resolusi damai (Wells Fargo, 2017).

Statemen terbuka juga dikeluarkan Citibank, menanggapi surat dari *stakeholder* di bank tersebut yang mempertanyakan keterlibatan Citibank sebagai investor dalam pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL). Dalam statemen tersebut Citibank menyatakan bahwa pihaknya turut memantau konstruksi proyek, termasuk isu yang muncul mengenai pencemaran lingkungan serta pelanggaran Hak Masyarakat Adat. Pihak bank juga mengungkapkan bahwa Citibank, bersama dengan TD Bank, telah menyewa Holey Foag LLP, firma HAM independen untuk turut meninjau segala hal yang berkaitan dengan perizinan, hukum, serta konsultasi dengan penduduk Standing Rock (citi, 2016). Sebagai anggota komite dari *Equator Principles* (EP) Citibank mengungkapkan bahwa pihaknya terus berfokus pada pengelolaan dan penanganan risiko lingkungan dan sosial dalam proyek tersebut. Meski demikian, pihak Citibank mengungkapkan bahwa mereka akan terus *men-support* (pengembangan) sumber energi yang terjangkau dan mudah diakses sementara terus membantu klien mengelola risiko dan peluang yang muncul terkait proyek pembangunan (citi, 2017).



Statemen mengenai kontroversi pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) juga dikeluarkan oleh Toronto-Dominion (TD) Bank, yang juga merupakan anggota dari *Equator Principles Financial Institutions* (EPFIs). Bersama Citibank, TD Bank menyewa firma HAM independen yang bertugas mengkaji seluruh aspek, termasuk legal hukum, hubungan dengan suku adat setempat, serta dampak sosial dari pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL). Dalam statemen terbuka melalui laman TD Newsroom, TD Bank mengungkapkan pihaknya memiliki standar uji kelayakan yang ketat terkait pembangunan infrastruktur dan turut memantau aktivitas pembangunan pipa. Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa bahan bakar fosil, saat ini masih menjadi komoditas yang “menjanjikan” kesejahteraan serta kenyamanan bagi masyarakat, disamping menyediakan lapangan kerja dengan *range* yang sangat luas bagi warga. Dengan demikian, selain terus mendukung terciptanya *clean energy* pihak bank masih akan mendanai industri energi fosil yang dalam prakteknya dapat menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, serta konsiderasi sosial (TD, 2017).

Institusi finansial global seperti Wells Fargo, Citigroup, serta TD Bank mengungkapkan bagaimana pendanaan pada proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) telah dilakukan melalui pengkajian *Environmental and Social Risk Management* ESRM. Di sisi lain, institusi-institusi finansial tersebut juga menekankan bagaimana sumber energi fosil masih akan terus dibutuhkan bagi Amerika Serikat dan dapat diandalkan sebagai proyek yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kerja sama yang telah terjalin selama puluhan tahun serta bantuan finansial yang diberikan kepada masyarakat adat juga menjadi aspek yang digarisbawahi oleh bank-bank pendana proyek DAPL, yang secara tidak langsung membentuk narasi bahwa institusi finansial tidak akan “mengorbankan” keberadaan masyarakat adat karena adanya proyek pipa minyak yang dibangun di dekat kawasan reservasi masyarakat Standing Rock di Dakota Utara. Narasi tersebut,

kemudian, memungkinkan pihak institusi finansial untuk terus memberikan bantuan dana pada proyek pembangunan DAPL sehingga dapat tuntas pada April 2017.

Kerangka *Environmental and Social Risk Management* (ESRM) yang dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan seperti *Equator Principles* (EP), dalam kasus pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) berperan sebagai “masyarakat politik” Gramsci atau *Repressive State Apparatus* (RSA) milik Althusser yang digunakan sebagai “tameng” oleh institusi-institusi finansial dunia untuk menjustifikasi sekaligus alat untuk meleakalkan pembangunan pipa (Leitch, 2001).